

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur Buku

- Aminuddin Ilmar, 2008, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, PT. Kencana Predana Group, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bodi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Jembatan.
- C.S.T. Kansil, 1982, *Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Daud Silalahi, 2003, *Pengantar Hukum Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: Pt. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan Ke-empat* (FHUI: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002).
- P. Raja Siregar, dkk, 2004, *Politik Air*, Jakarta:Walhi.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres.
- Sunarjati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perairan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tentang Pengusahaan Sumberdaya Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air.

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Air dan Libah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### 3. Jurnal

Frenadinadin Adegustara, dkk: Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia : Volume 24 No.2 (Juli- Desember) 2016.

Hafied A. Gany, *Sumberdaya Air Memasuki Era Globalisasi Dan Perspektif Hidrologi, Desentralisasi Dan Demokrasi Diseputar Konstalisasi Privatisasi Dan Hak Guna Air*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2, September 2005, Jakarta

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani : Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 4 No.2 April 2015.

Upik Hamidah : Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Air di Kota Bandar Lampung, Jurnal Cita Hukum, Vol. III No.2, Desember 2015

### 4. Skripsi/ Tesis

Dewi Meryanti, Tesis : *Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih DiPulau Batam Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/Kppu-L/2008 TentangPraktek Monopoli Oleh Pt Adhya Tirta Batam)*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

Shales Algifari, Skripsi : *Jaminan Perlindungan Hak Atas Air Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015)

Arwal, Skripsi : Penguasaan Air Tanah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Provinsi SUMATERA Barat, (Padang:  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016)

## 5. Literatur Internet

<http://kamusbahasaIndonesia.org/privatisasi%20KamusBahasaIndonesia.org>

di akses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 20.32

<http://kamusbahasaIndonesia.org/komersialisasiKamusBahasaIndonesia.org>

di akses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 20.32

<http://detik.com/detiknews/read/2017/3/20/160749/1797806/10/tingkat-kebocoran-air-pamjaya-433>di akses tanggal 20 Maret 2017.

[http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida\\_history.jsp](http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp), diakses 23 Desember 2017, jam 10.00 WIB.

<http://www.atbbatam.com>, diakses 3 Januari 2018, jam 10.00 WIB.

<http://www.atbbatam.com>, diakses 3 Januari 2018, jam 10.00 WIB.

